

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus pada BUMDes Cahaya Bumi Perkasa Desa Pekiringan
Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ADISETYA DWI ASTARI

NIM. 1617201046

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IAIN PURWOKERTO

2020

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(Studi Kasus pada BUMDes Cahaya Bumi Perkasa Desa
Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)**

**Adisetya Dwi Astari
NIM.1617201046**

E-mail : adisetyadwi1@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dimiliki. Peranan BUMDes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasarsa masyarakat berfungsi untuk menstimulasi, memfasilitasi dan melindungi serta pemberdayaan masyarakat pedesaan. Penelitian ini mengambil objek BUMDes Cahaya Bumi Perkasa, Desa Pekiringan, Karangmoncol, Purbalingga yang bertujuan untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dimana penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, data display, dan kesimpulan/ verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Cahaya Bumi Perkasa melalui program-program yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat sudah berperan dalam meningkatkan ekonomi. Program-program yang sudah terealisasi di BUMDes Cahaya Bumi Perkasa adalah unit usaha penggemukan sapi, unit usaha pengelolaan pasar, unit usaha simpan pinjam, dan unit usaha pertanian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program tersebut sudah meningkatkan ekonomi terutama pada peningkatan pendapatan penduduk yang terlibat dalam program, infrastruktur yang baik khususnya dari unit usaha pengelolaan pasar, dan peningkatan penerimaan pendapatan asli desa disetiap tahunnya.

Kata Kunci : *BUMDes, Peningkatan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Peran BUMDes	14

B. Peningkatan Ekonomi.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Jenis dan Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data.....	30
F. Uji Keabsahan Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum BUMDes Cahaya Bumi Perkasa	33
B. Analisis Peran BUMDes Cahaya Bumi Perkasa dalam Meningkatkan Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat	43
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan taraf hidupnya, namun masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi warna dalam kehidupan bangsa dan negara sampai saat ini. Kehadiran negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan belum terwujud. Tidak hanya peranan negara untuk melakukan pembangunan nasional demi mencapai cita-cita bangsa. Dalam hakikatnya, pembangunan nasional muncul dari, dilakukan oleh, dan untuk rakyat dalam seluruh aspek kehidupan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keadilan.

Pembangunan nasional adalah kehendak seluruh bangsa untuk terus menerus melakukan usaha peningkatan terhadap taraf kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Sebuah negara dapat dikatakan sukses dalam pembangunan nasional apabila memiliki lapangan pekerjaan yang luas, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun untuk mencapai hal tersebut, negara harus pandai dalam mengelola dan mengatur sistem ekonomi juga memanfaatkan potensi yang dimiliki negara. Adanya sinergi pemerintah, dan pelaku ekonomi menjadi salah satu kekuatan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang merata. Pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengatur, mengawasi, dan memberi arahan kepada para pelaku ekonomi untuk berperan secara optimal untuk kepentingannya sendiri tanpa mengabaikan tanggung jawabnya kepada pemerintah dan masyarakat.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat

provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Sebuah kabupaten dikatakan memiliki ekonomi yang baik jika adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Dengan hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan di seluruh tingkat pembangunan, dan keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Tak hanya itu, apabila ekonomi di pedesaan baik maka akan memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Pembangunan nasional yang dilakukan dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah kecil dalam kerangka negara kesatuan seperti halnya pada desa merupakan sembilan program Nawacita dan Wakil Presiden Indonesia. Langkah ini dipandang strategis untuk menjadi pijakan dalam menciptakan negara yang makmur dan juga menjadi tonggak dalam menghadapi persaingan global saat ini. Desa merupakan bagian wilayah terbawah dan sudah biasa dipandang sebagai daerah miskin menjadikan pemerintah memiliki tugas untuk memberi perhatian yang besar dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Pembangunan desa menjadi salah satu langkah di garda belakang sebagai strategi dalam membantu mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera. Menurut UU No.4 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa pada hakekatnya untuk membangun kemandirian. Melalui pemberdayaan masyarakat, pedesaan dapat berkembang untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Penguatan dan pengembangan dasar ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun berbagai upaya tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan sebagaimana yang

diinginkan. Intervensi yang terlalu besar yang dilakukan pemerintah menjadi salah satu faktornya (Nurhayati, 2018:3). Karena melalui intervensi yang besar justru mengakibatkan terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam menjalankan ekonomi desa. Masih besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan kegiatan ekonomi masyarakat, penganggaran, dan pengelolaan sumber daya, disini menimbulkan sekat yang teramat jauh bagi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya sebatas partisipasi simbolik. Sistem dan mekanisme yang tidak berjalan efektif, berpengaruh pada ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah yang akhirnya mematikan kemandirian masyarakat desa.

Berdasarkan asumsi itulah sudah seharusnya pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap eksistensi desa. Pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang baru terkait dengan pemberdayaan ekonomi dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan dapat memberikan stimulus baru dalam menggerakkan roda ekonomi desa. Pemerintah mengeluarkan program melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu BUMDes sebagai salah satu program dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dimiliki. Dalam artian, usaha yang kelak akan diwujudkan merupakan suatu hal yang digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan kemajuan masyarakat desa. Dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat atau dengan membentuk sebuah lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional namun masih tetap bersandar pada potensi desa yang ada ini akan usaha masyarakat lebih efektif dan produktif. Kedepannya, BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa dan juga menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Pemerintah Jawa Tengah melakukan pengupayaan dengan memaksimalkan dana desa yang dikucurkan untuk program-program seperti halnya mendirikan BUMDes di tiap-tiap daerah yang diyakini bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. BUMDes yang dibentuk sebagai ujung tombak pembangunan desa masih banyak yang belum dijalankan atau masih banyak desa yang tidak memiliki BUMDes, sehingga keberadaan BUMDes belum efektif dan mampu memberikan pengaruh positif bagi perkembangan desa. Saat ini di Jawa Tengah telah terbentuk 134 BUMDes dari 1.089 desa yang ada atau baru 19% dari jumlah desa. Di Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa tetapi baru ada 161 unit BUMDes dan 13 BUMDes bersama. Menurut Dyah Hayuning Pratiwi dari 161 BUMDes yang ada hanya sekitar 37% atau 60 unit usaha yang sehat, sisanya kondisi mati suri karena pengelolaannya kurang optimal. (Dinkominfo, 2016)

Selepas dari masalah tersebut, terdapat salah satu daerah yang ada di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga yaitu Desa Pekiringan. Desa Pekiringan merupakan Desa yang penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan guru. Desa yang merupakan ibukota Kecamatan Karangmoncol ini dalam bidang perdagangan sangat maju karena merupakan pusat kecamatan dan memiliki pasar tradisional terbesar di Kecamatan Karangmoncol. Desa Pekiringan memiliki potensi yang baik dibidang pertanian, peternakan, dan industri rumahan.

Lahirnya BUMDes Cahaya Bumi Perkasa pada awal sekitar tahun 2016, berfokus pada pembangunan desa wisata, dengan menghidupkan kembali museum desa, pembelian mobil wisata. Namun hanya berjalan satu tahun. Tahun 2017 BUMDes Desa Pekiringan tidak menjalankan program apapun. Di pertengahan tahun 2018, BUMDes aktif kembali dengan program-program baru. Program unggulan yaitu pemberian pinjaman modal. Dibawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Kepala Desa Adi Kusumantoro, BUMDes dirombak struktur organisasinya dan lahirlah program-program baru

dan program unggulan adalah peminjaman modal pedagang pasar. Keberhasilan BUMDes Cahaya Bumi Perkasa mendapatkan nominasi BUMDes kategori berkembang. (Subroto, 2020 dalam Wawancara bersama Kepala BUMDes Cahaya Bumi Perkasa).

Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Desa dari BUMDes Cahaya Bumi Perkasa

Tahun	Jumlah penerimaan
2016	Rp.3.780.000
2017	Rp.0
2018	Rp.5.631.000
2019	Rp.11.850.000

Sumber : BUMDes Cahaya Bumi Perkasa Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol

Program BUMDes adalah salah satu langkah jitu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes Cahaya Bumi Perkasa dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih baik, dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang sesuai kemampuan melalui sumber daya alam dan potensi desa lainnya. Pemerintah Desa Pekiringan berusaha untuk mencoba membangun sistem sehingga semua kegiatan perekonomian masyarakat kedepannya akan lebih terencana dan terarah. Apabila sistem tersebut terlaksana, maka tujuan yang diharapkan dari pemerintah Desa Pekiringan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa akan tercapai. Peranan BUMDes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasarsa masyarakat berfungsi untuk menstimulasi, memfasilitasi dan melindungi serta memberdayakan masyarakat pedesaan. Maka didirikannya BUMDes Cahaya Bumi Perkasa akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat Desa Pekiringan.

Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol**

Kabupaten Purbalingga”. Adapun permasalahan yang ingin diteliti dalam kegiatan ini meliputi peran BUMDes Cahaya Bumi Perkasa dalam meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, dan dampak program dalam meningkatkan ekonomi melalui BUMDes Cahaya Bumi Perkasa.

B. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak ingin dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah

1. Peran BUMDes

Dalam teori peran, peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kedepannya. (Soekanto, 2013:212)

BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. (Aryo, 2015:11)

Sehingga yang dimaksud peran BUMDes adalah tugas yang harus dilakukan oleh BUMDes. Peran BUMDes tercantum di dalam UU Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan

sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

3. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya (PPPSDAK, 2017:3)

C. Rumusan Masalah

Bagaimana peran BUMDes Cahaya Bumi Perkasa dalam meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis peran BUMDes Cahaya Bumi Perkasa dalam meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan, yaitu:

- a. Manfaat secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan ekonomi yang dimiliki desa melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi lokal.

b. Manfaat secara Praktis

- 1) Bagi peneliti sebagai sumber wawasan dan pengalaman serta melatih dalam bertanggungjawab
- 2) Bagi perusahaan, sebagai sumber wawasan keilmuan baru yang dapat digunakan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Desa dalam mengetahui lebih jauh mengenai peranan badan usaha milik desa dalam mengembangkan usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya, sebagai pelengkap bagi penelitian yang menggunakan objek (BUMDesa) yang sama ataupun subjek (peranan) yang sama.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan peneliti kemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Menurut Soekanto, peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan, begitupun sebaliknya. Setiap orang mempunyai peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kedepannya. (Soekanto, 2013:212-213)

Teori lain yang relevan dengan penelitian ini adalah konsep BUMDes. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes dibentuk sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk teori peningkatan ekonomi (Riniwati,2016:34) permasalahan utama dalam pembangunan daerah terletak pada prioritas daerah terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berbasis *endogenous development* atau didasarkan pada kekhasan/karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan alam, potensi lokal, dan kelembagaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa melaksanakan program peningkatan ekonomi yang inovatif untuk menjawab tantangan kemandirian ekonomi tersebut. Yang selanjutnya akan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat” menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang

memungkinkan mereka untuk dapat meningkatkan pendapatannya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pendekatan utama dari konsep pemberdayaan adalah “masyarakat tidak dijadikan obyek dari suatu proyek pembangunan melainkan menjadi subyek yang terlibat dari pembangunan itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi akan memberikan pengalaman bagi masyarakat dan terwujudnya kemandirian masyarakat.

Penulis juga mendapati penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Tabel 1.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Nama	Judul	Isi Penelitian	Persamaan/Perbedaan
Kadek Sumiasih, (2014), Jurnal Magister Hukum Udayana	Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupatn Klungkung)	Isi dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Eksistensi BUMDes Pasca berlakunya Undang-Undang Desa telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat desa di Bali, termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. BUMDes Pakse Bali mengelola sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.	Persamaan : peranan BUMDes dalam mengelola potensi yang ada di desa. Perbedaan : penelitian terdahulu lebih berfokus pada satu sektor yaitu pariwisata.

<p>Arief Hudiono, (2018), IAIN Purwokerto</p>	<p>Efektivitas Program Bumdesa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus Bumdesa Arto Doyo Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas)</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah membahas efektivitas Bumdesa Arto Doyo dalam memberdayakan masyarakat desa Samudra Kulon. Dari beberapa program ada, baru satu program yang terlaksana yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam. Efektivitas pemberdayaan ekonomi desa Samuddra Kulon diukur menggunakan 7 indikator efektivitas program, dan hasilnya menunjukkan masih belum efektif pelaksanaan bumdesa tersebut</p>	<p>Persamaan : pemberdayaan masyarakat dalam program bumdes Perbedaan : penelitian terdahulu lebih mengenai keefektivitasan bumdes yang diukur menggunakan indikator</p>
<p>Amelia Sri Kusuma Dewi, (2016) Journal of Rural and Development</p>	<p>Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta Menumbuhkan Perekonomian Desa</p>	<p>Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan untuk memajukan desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan</p>	<p>Persamaan : peranan BUMDes dalam mengembangkan perekonomian Perbedaan : pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada badan hukum yang menguatkan pendirian BUMDes</p>

<p>Adon Nasrulloh Jamaludin, (2015), UIN Sunan Gunung Djati</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Penelitian di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut)</p>	<p>legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.</p> <p>PNPM dalam programnya menjalankan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, seperti peningkatan kualitas pemukiman, perbaikan jalan, pengadaan air bersih. Selain itu, terdapat program peminjaman dana untuk warga berupa kredit tanpa jaminan yang bertujuan untuk meningkatkan usaha. Dalam program sosial, PNPM mengadakan bantuan untuk keluarga miskin dan lansia.</p>	<p>Persamaan : keterlibatan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat</p> <p>Perbedaan : program yang dijalankan dalam penelitian ini adalah PNPM</p>
---	--	--	---

<p>Salman Fathoni (2017), Universitas Diponegoro</p>	<p>Penentuan Prioritas Proyek menggunakan <i>Fuzzy Analytic Network Process</i> (Studi Kasus BUMDes Desa Kemudo, Prambanan, Klaten)</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan : penggunaan fuzzy analytic network process bertujuan untuk menentukan pengelolaan proyek yang berpotensi besar bagi BUMDes Kemudo, Prambanan</p>	<p>Persamaan : pengelolaan potensi desa melalui BUMDes Perbedaan : penggunaan <i>fuzzy analytic network process</i> untuk menentukan pengelolaannya</p>
--	---	---	---



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan mendatangi dan mewawancarai pengelola BUMDes Cahaya Bumi Perkasa dan beberapa warga masyarakat yang terlibat dalam program BUMDes mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi, maka mendapatkan hasil program BUMDes Cahaya Bumi Perkasa melalui unit usahanya sudah berjalan dengan baik. BUMDes Cahaya Bumi Perkasa memiliki 5 program, yaitu unit usaha peternakan (penggemukan sapi), unit usaha pengelolaan pasar, unit usaha simpan pinjam, unit usaha pertanian, dan rencana pengadaan toserba. Dari 5 program tersebut baru 4 program yang terealisasi. Program-program yang ada di BUMDes Cahaya Bumi Perkasa sudah terdapat arah pemberdayaan, masyarakat dilibatkan partisipasi dalam program tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi. Dari sini dapat dilihat bahwa BUMDes Cahaya Bumi Perkasa sudah berperan dalam meningkatkan ekonomi yaitu pada peningkatan pendapatan penduduk dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang terlibat pada program, infrastruktur yang baik, dan peningkatan penerimaan asli desa setiap tahunnya dari pembagian keuntungan BUMDes Cahaya Bumi Perkasa. Meskipun sudah berjalan dengan baik, tingkat partisipasi masyarakat dalam program BUMDes masih rendah. Peran BUMDes hanya dirasakan oleh masyarakat yang terlibat saja dalam unit-unit usaha yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak

1. Bagi pengelola BUMDes Cahaya Bumi Perkasa

Untuk pengelola BUMDes Cahaya Bumi Perkasa untuk lebih mempersiapkan secara matang apabila membuat unit usaha baru untuk meminimalisir kegagalan program. Menggali potensi desa dan masyarakat agar unit usaha yang didirikan melibatkan masyarakat secara luas. Pengelola BUMDes Cahaya Bumi Perkasa juga diharapkan melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat secara merata mengenai program-program BUMDes

2. Bagi masyarakat desa Pekiringan

Kepada masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dengan program BUMDes yang telah ada yang memiliki tujuan dan manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat.

3. Bagi pemerintah desa

Diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada pengurus dan anggota BUMDes seperti memberikan fasilitas dan modal yang dapat memperbanyak unit usaha untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mari. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Budiani, N. W. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial* , 2, 53.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Junaidi, M. A. 2018. *Peran BUMDes dalam Penguatan Ekonomi di Desa Kedung Kecamatan Taman*.
- Kusumaningrat, H. 2009. *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mizan, A. 2016, Juli-Desember 2. *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. Madis Jurnal Kajian Ekonomi Islam*.
- Moeleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, B. 2012. *Six Dimension Organization dengan Pendekatan Organization Development*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Noor, M. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Civis Vol 1 No 2*.
- Nurhayati, C. 2018. *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta.
- Pembangunan, P. K. (n.d.). *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*.
- PPPSDAK. 2017. *Modul Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : PPPSDAK Press.
- Purnama, A. S.2015. *BADAN USAHA MILIK DESA : Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2018

Surat Keputusan Kepala Desa Pekiringan No 2 Tahun 2018 tentang Susunan Kepungurusan Badan Usaha Milik Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Internet

Blog BUMDes. 2018. Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa. Diakses dari Blog BUMDes : [http://blog.bumdes.id/2018/02/peran-bumdes-dalammeningkatkan-kesejahteraan-desa/](http://blog.bumdes.id/2018/02/peran-bumdes-dalammeningkatkan-kesejahteraan-des/) pada 29 Mei 2020

Desa, U. 2019. Cara Meningkatkan Perekonomian. Diakses dari Berdesa: <http://www.berdesa.com/cara-meningkatkan-perekonomian-pedesaan-agar-semakin-maju/> pada 29 Mei 2020

Dinkominfo. 2016. Pemkab Purbalingga Diminta Kembangkan BUMDes. Diakses dari PemKabPurbalingga: <http://www.purbalinggakab.go.id/diminta-kembangkan-bumdes-desa-harus-berinovasi/> pada 13 November 2019